

Media Online	Radarsolo.jawapos.com
Tanggal	18 January 2023
Wilayah	Kabupaten Sragen



DPRD Sragen: Kenaikan PBB Beban Masyarakat

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/18/01/2023/dprd-sragen-kenaikan-pbb-bebani-masyarakat/>

RADARSOLO.ID – DPRD Sragen merasa tidak dilibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal itu disayangkan karena banyak memunculkan keluhan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Sragen Haryanto menyampaikan, secara prinsip pihaknya mengawal terkait pendapatan daerah. Sejauh ini sudah ada upaya dari pemerintah daerah (pemda) untuk menggali pendapatan sebesar-besarnya. Lantaran masih ada defisit anggaran sekira Rp 315 miliar. Namun sayangnya upaya menggali pendapatan tersebut tidak dibicarakan bersama DPRD Sragen.

"Tapi sayangnya kami tidak dilibatkan, kenaikan (PBB) ini membebani masyarakat. Seharusnya dicari keputusan untuk kenaikan sewajarnya," ujar Haryanto, Selasa (17/1/2023).

Dia mengaku sudah berdiskusi dengan Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor perihal keluhan masyarakat tersebut. Dia mendorong dilakukan pengajuan audiensi dengan perwakilan masyarakat.

"Kami sebagai wakil rakyat juga merasa kasihan, ketika ada upaya menaikkan PAD harus ada yang diajak rembuk. Harus ada inovasi tapi jangan sepihak," terangnya.

Terkait tambahan biaya jaringan, Haryanto menilai saat ini Kabupaten Sragen memang menuju menjadi Kabupaten Smart City. Namun jangan ada biaya yang dibebankan ke masyarakat secara tiba-tiba.

"Saya juga belum paham itu biaya jaringan apa, tapi kalau Rp 1.500 dikalikan sekian banyak wajib pajak kan juga besar," jelasnya.

Terpisah, Kepala BPKPD Kabupaten Sragen Dwiyanto menyampaikan sesuai ketentuan, kebijakan kenaikan PBB menjadi wewenang bupati. Namun dia menekankan sudah melakukan komunikasi dengan DPRD Sragen.

"Namanya pemerintah dengan dewan kan seiring sejalan. Komisi II juga menanyakan ke kami, naik atau tidak. Pernah kami sampaikan ke komisi II akan naik sesuai ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2012 terkait PBB," jelasnya.

Dia menyangkal, tidak mungkin kenaikan PBB tanpa sepengetahuan dewan. Sudah pasti tahu soal kenaikan PBB dan dilaporkan dalam laporan komisi. Apalagi raperda untuk tindak lanjut UU Nomor 1 tahun 2022 masuk tahun ini.

"Jadi nanti potensi akan lebih besar lagi (pajak,Red), tapi tidak memberatkan masyarakat, masih wajar lah," terangnya.

Seperti diketahui, Sekretaris GP Ansor Kabupaten Sragen Kristiyanto menyampaikan ada sejumlah keluhan terkait PBB Kabupaten Sragen. Yakni kenaikan PBB yang tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi ke masyarakat.

"Misalnya PBB salah satu bidang tanah di Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung dengan luasan 2.000 meter pada 2022 senilai Rp 60 ribu. Tahun ini menjadi Rp 120 ribu. Kenapa tidak ada sosialisasi," tandasnya. **(din/adi/dam)**